

Ekonomi

Untuk SMA dan MA Kelas XI

Jilid 2 untuk SMA dan MA Kelas XI

Ismawanto



PUSAT PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2

Ismawanto

Ekonomi

Untuk SMA dan MA Kelas XI



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

2

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi oleh Undang-undang

EKONOMI Jilid 2 untuk SMA dan MA Kelas XI

Penulis : Ismawanto Editor : Suciati Diah Pramesti Perancang Kulit : Alfianto S Perancang Tata Letak Isi :
Irawan Eka Praditty Layout : Irawan Eka Praditty Ilustrator : Irawan Eka Praditty Sumber Gambar
Cover : www.tropicalisland.de Ukuran Buku : 21 x 28,5 cm

330.07

ISM
m

ISMAWANTO

Ekonomi 2 : Untuk SMA dan MA Kelas XI / penulis, Ismawanto ;
editor, Suciati Diah Pramesti ; ilustrator, Irawan Eka Praditty
.— Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.

vii, 241 hlm. : illus. ; 30 cm.

Bibliografi : hlm. 238

Indeks

ISBN: 978-979-068-700-4 (no jilid lengkap)

ISBN: 978-979-068-708-0

1. Ekonomi-Studi dan Pengajaran I. Judul

II. Suciati Diah Pramesti III. Irawan Eka Praditty

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional. Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/ penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia. Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009 Kepala Pusat Perbukuan

Kata Sambutan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	v
Semester I Bab I Ketenagakerjaan.....	3
A. Definisi Ketenagakerjaan.....	5
B. Pengangguran.....	7
C. Pembangunan Ekonomi	11
D. Kebijakan Dasar Pemulihan Ekonomi Nasional	20
Latih Kemandirian 1.....	23
Bab II Kebijakan Fiskal	25
A. Pengertian APBN dan APBD	27
B. Sumber-Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara.....	30
C. Pengaruh APBN dan APBD terhadap Perekonomian	33
D. Kebijakan Fiskal.....	34
E. Pajak.....	37
Latih Kemandirian 2.....	53
Bab III Pasar Modal	55
A. Pasar Uang	57
B. Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market)	58
C. Pasar Modal (Capital Market)	60
D. Pasar Barang Berjangka (Bursa Komoditas)	64
E. Pasar Tenaga Kerja.....	65
F. Mekanisme Kerja Bursa Efek	66
Latih Kemandirian 3.....	69
Bab IV Perekonomian Internasional.....	71
A. Perdagangan Internasional.....	73
B. Teori Perdagangan Internasional	75
C. Kebijakan Perdagangan Internasional.....	80

D. Pembayaran Internasional	85
E. Neraca Pembayaran	93
F. Sistem Kurs Valuta Asing.....	101
G. Kerja Sama Ekonomi Internasional.....	106
Latih Kemandirian 4.....	115
Latihan Semester I.....	117

Semester I



BAB I

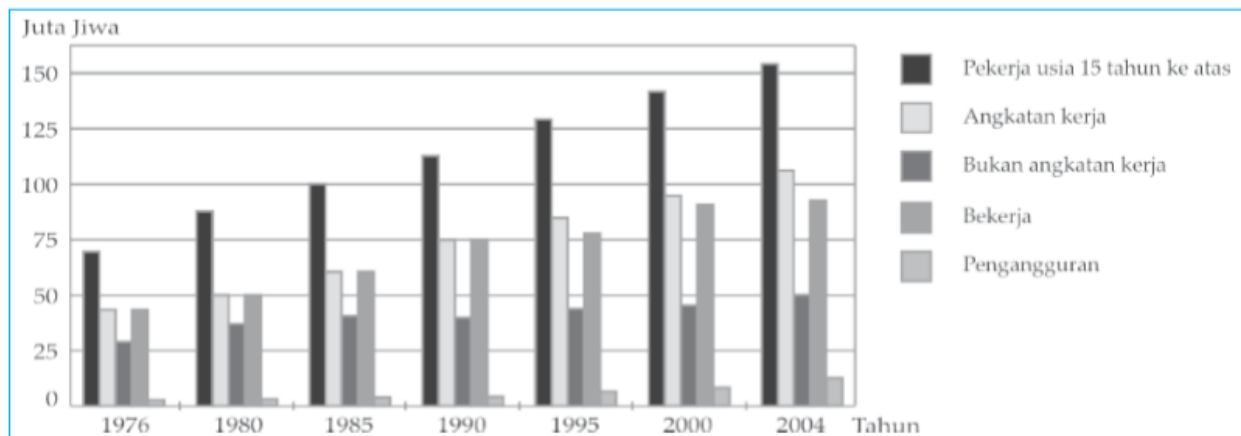
Ketenagakerjaan



Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan modal dasar pembangunan. Akan tetapi, banyaknya jumlah penduduk jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja justru akan memunculkan permasalahan baru dalam hal ketenagakerjaan, di mana angka pengangguran mengalami peningkatan yang besar pula. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia terutama pembangunan ekonomi selalu diharapkan membawa berita gembira yaitu meningkatnya produksi nasional, terbukanya kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, neraca pembayaran luar negeri yang tidak defisit, kenaikan pendapatan nasional, dan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, pada bab ini kamu akan mengetahui sejauh mana kondisi ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap pembangunan.

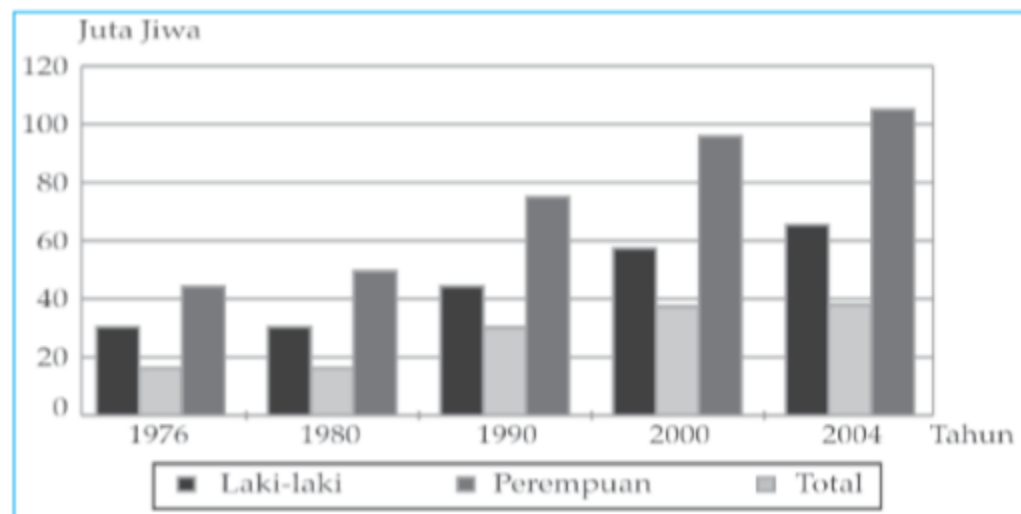
Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja mempunyai dua pengertian, yaitu: 1. dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja, 2. dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Tingginya pertambahan penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, baik dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, rata-rata berada di Pulau Jawa dan sebagian yang lain berada di luar Pulau Jawa. Pertumbuhan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha atau lapangan usaha akan meningkatkan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penyerapan angkatan kerja. Pengertian angkatan kerja menurut UU No. 20 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.



Gambar 1.1 Keadaan angkatan kerja tahun 1976–2004.

Sumber: Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka.



Gambar 1.2 Angkatan kerja menurut jenis kelamin tahun 1976–2004.

Sumber: Statistik 60 tahun Indonesia Merdeka.

